

Implementasi fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana edupreneur pada mahasiswa

Meiwatizal Trihastuti ¹, Yayuk Hidayah ²

¹ STKIP Pasundan, Cimahi

² Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

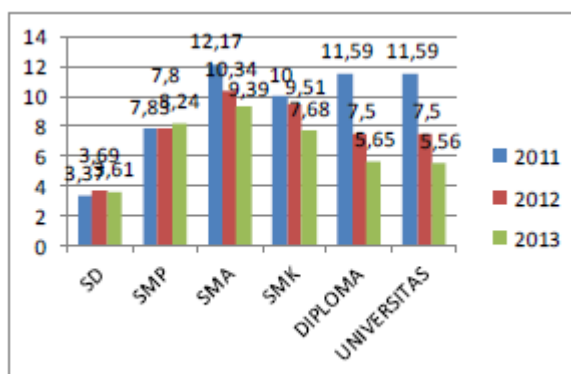
INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel Diterima: 20/12/2021 Disetujui: 31/12/2021 Kata kunci <i>Edupreneur</i>; mahasiswa; pendidikan kewarganegaraan Keywords <i>Civic Education</i>; <i>Edupreneur</i>; <i>Student</i>	Edupreneur pada mahasiswa merupakan hal yang penting, dalam hal ini Edupreneur dapat dilaksanakan melalui fungsi pendidikan kewarganegaraan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan cara memperoleh informasi selengkap mungkin melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Temuan hasil penelitian, bahwa fungsi pendidikan kewarganegaraan berperan dalam edupreneur mahasiswa. Fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam wujud edupreneur ialah sebagai praktik wirausaha. Upaya memaksimalkan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kendala yakni dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam melaksanakan edupreneur guna meningkatkan kesadaran berwirausaha masyarakat.
	ABSTRACT <i>Edupreneur in students is important, in this case Edupreneur can be implemented through the function of civic education. The method in this study uses a qualitative approach with descriptive research, by obtaining as complete information as possible through interviews, observation and documentation studies. The findings of the research, that the function of civic education plays a role in student edupreneur. The function of civic education in the form of edupreneur is as an entrepreneurial practice. Efforts in maximizing the function of civic education in overcoming obstacles are by improving the quality of learning in implementing Edupreneurs in order to increase public entrepreneurship awareness.</i>

Pendahuluan

Berangkat dari pandangan Sumarsono dkk., (2002) kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Kompetensi ini akan bersanding dengan visi pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi yang memiliki visi mata kuliah sebagai alat pengembangan kepribadian yang dijadikan sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya (Jamaludin et al., 2017). Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa, karena jika didasarkan pada tujuannya, PPKn atau *civic education* mempunyai fungsi dan peran sebagai pendidikan kewarganegaraan (Winataputra & Budimansyah, 2012). Dalam konteks ini peran PPKn bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis.

Sejarah membuktikan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran yang besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negaranya. Mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan kampus merupakan *agent of change* yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik (Nurmalisa et al., 2020). Oleh karena itu, harus ada usaha yang dilakukan oleh lembaga satudian pendidikan dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran mahasiswa yang tidak terbatas pada ruang persegi dalam kelas, tetapi juga mampu mengepakkan sayap keilmuannya dalam membangun kesadaran berwirausaha atau yang disebut *edupreneur* (Fauzan, 2021).

Menghadapi era industri 4.0 perguruan tinggi harus mampu menyiapkan dengan baik lulusannya, baik dari aspek *hard skills* maupun *soft skills*. Perguruan tinggi juga dituntut untuk mampu menyiapkan lulusan yang bermental kuat sehingga menjadi generasi yang tangguh dan tidak menyerah. Kompetensi ini diharapkan dapat membentuk kepribadian mahasiswa yang memiliki jiwa mandiri dalam bertanggung jawab untuk kehidupannya (Wagner, 2016). Urgensi lain dari penelitian ini ialah untuk membantu mahasiswa dalam memanfaatkan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya, dalam rangka mencegah terjadinya pengangguran di masa yang akan datang. Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan (sumber: BPS, 2013) disajikan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1 Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan
(Sumber: BPS, 2013)

Diagram di atas menunjukkan bahwa adanya keterbatasan lapangan pekerjaan, memaksa diri untuk memutar otak, membuka pikiran dan memunculkan ide kreatif untuk menciptakan usaha atau bisnis sendiri. Jika kreatifitas sudah dituangkan, lalu meyakinkan hati dalam membuka dan mengelola bisnis sebaik mungkin, serta berani mengambil resiko serta dibutuhkannya dukungan kepribadian percaya diri (Masitha et al., 2017). Penelitian Siti Nurjanah tentang Kurikulum Berbasis *entrepreneurship* Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap menghadapi dunia kerja adalah dengan menerapkan kurikulum perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) dan menentukan profil lulusan yang sesuai dengan program studi, di antaranya adalah *edupreneurship* (Nurjanah, 2019).

Fokus kajian penelitian ini menyoroti fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk mengembangkan karakter dan kesadaran mandiri mahasiswa dalam membangun kekayaan intelektual, serta kecakapannya dalam menghadapi dunia yang nyata dengan menciptakan kreativitas dan inovasi dalam lingkungan hidupnya. Pendidikan ini disebut sebagai *edupreneurship*. *Edupreneurship* merupakan *entrepreneurship* yang khas dalam bidang pendidikan, dimana pendidikan *entrepreneurship* ini merupakan usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan. Intensi/niat dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan diwujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif dan berani mengelola resiko (Wibowo et al., 2019).

Kolaborasi pendidikan kewarganegaraan dengan *edupreneur* merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan berorientasi pada tujuan atau sasaran dalam dunia kerja. Sehingga pernyataan ini menjadi wujud mempersiapkan mahasiswa yang siap dalam menghadapi lapangan pekerjaan (Gauthier, 2020). Cakupan *edupreneur* tidak hanya terbatas pada pengembangan kesadaran berwirausaha, tetapi juga pilihan untuk mengembangkan kualitas sumber daya mahasiswa. Sehingga penelitian ini terasa penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa dunia tidak bekerja tidak lagi sama dan berdiam diri di tempat, melainkan akan terus bergerak maju. Mahasiswa harus mampu memiliki kriteria dan kompetensi yang dapat menjemput peradaban

yang diciptakan oleh dunia. Hal ini dilakukan melalui berbagai tahap dan proses yang terencana, tentu saja melalui proses pendidikan (Kasmir, 2011).

Pernyataan di atas sudah menyinggung bahwa *edupreneur* merupakan cakupan luas yang dijadikan sebagai jembatan pengembangan kualitas mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengabdikan kompetensi yang didapatkannya dalam bangku perkuliahan ke dalam lingkungan kerja masyarakat ia dapat mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya sesuai dengan keahlian dan kajian ilmunya masing-masing (Desler, 2007). Berkaca dari penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempersiapkan *output* mahasiswa yang siap dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkannya pada pembelajaran di kampus dan digunakan dalam lingkungannya agar terbentuk jiwa kemandirian mahasiswa dengan berbasis pada kreativitas dan inovasi pendidikan kewarganegaraan.

Metode

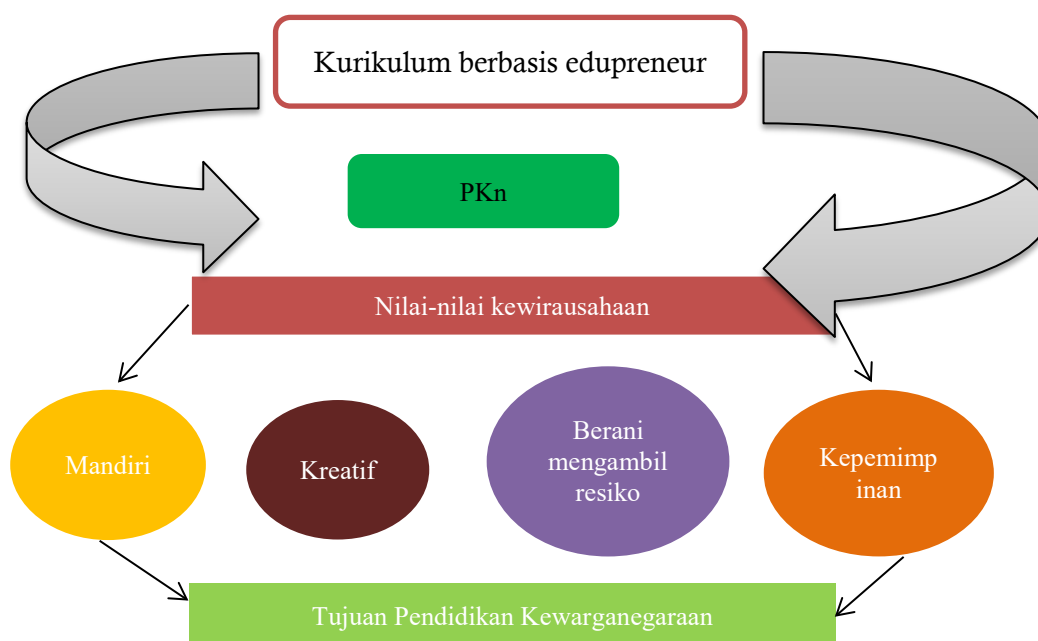
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan manusia secara fundamental bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari para partisipan (Creswell, 2016). Analisis penelitian ini dengan analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji data, mengorganisasikan data, memilih data yang akan dikelola, mencari dan menemukan data sehingga dapat berbentuk sebuah informasi (Moleong, 2017). Lokasi penelitian di program studi PPKn STKIP Pasundan Cimahi. Sesuai dengan jenis penelitian, pengumpulan data menggunakan langkah wawancara, observasi, dokumentasi, catatan lapangan sebagai langkah penguat hasil penelitian (Creswell, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa fungsi pendidikan kewarganegaraan berperan dalam *edupreneur* mahasiswa. Fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam wujud *edupreneur* ialah sebagai praktik wirausaha. Upaya dalam memaksimalkan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi kendala yakni dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam melaksanakan *edupreneur* guna meningkatkan kesadaran berwirausaha masyarakat.

Salah satu hasil penelitian bahwa upaya untuk memperkuat *edupreneur* melalui pendidikan kewarganegaraan ialah dengan penanaman mental *entrepreneur* mahasiswa yang diinternalisasikan dalam pendidikan yang sering disebut dengan *edupreneurship*. *Edupreneurship* bukan bertujuan menjadikan mahasiswa sebagai pengusaha, tetapi lebih pada pembentukan karakter *edupreneur* dalam bidang pendidikan (Prodi PGMI IPMAFA, 2016). Temuan peneliti menunjukkan bahwa STKIP Pasundan merupakan salah satu pelaku pendidikan yang menintegrasikan nilai-nilai *edupreneur* ke dalam perangkat pembelajaran yang diberikan nyawa dalam pelaksanaan pembelajaran. STKIP Pasundan menerapkan nilai kewirausahaan ke dalam kegiatan Laboratorium Demokrasi yang menjadi program terintegrasi dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan (Anjani et al., 2014).

Nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan Laboratorium Demokrasi STKIP Pasundan dapat dilihat watak, jiwa, perilaku dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, tujuan dari dibentuknya Laboratorium Demokrasi ini juga selain mengembangkan karakter kewarganegaraan mahasiswa juga untuk meningkatkan nilai pragmatik atau nilai kewirausahaan mahasiswa, yaitu: memiliki perencanaan, ada prestasi yang dicapai, produktivitas, memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, kreativitas, inovatif, kualitas kerja, komitmen, kerjasama, kesempatan, bekerja keras, serta memiliki keberanian dalam mengambil resiko (Kahne et al., 2011). Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional telah menetapkan 17 nilai kewirausahaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik termasuk di dalamnya terdapat nilai mandiri, kreatif dan berani mengambil resiko (Basrowi, 2011). Sehingga pernyataan ini sesuai dengan temuan penelitian yang disajikan pada gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2 Temuan penelitian tentang implementasi fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana *edupreneur* pada mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum berbasis nilai *edupreneur* ialah kunci mencapai keberhasilan perguruan tinggi dalam tujuannya menciptakan lulusan yang berdaya saing dan berkualitas tinggi di pasar kerja. Kurikulum berbasis *edupreneur* yang diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk mahasiswa sebagai warga negara muda yang memiliki rasa mandiri dalam menciptakan lapangan kerja (Nurseto, 2010). Pernyataan tersebut diperkuat oleh pandangan Wahab & Sapriya (2011) bahwa pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya ialah untuk membentuk karakter dan watak warga negara yang dewasa dan mandiri dalam menghadapi lingkungannya.

Hasil lain yang ditemukan oleh peneliti, sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi pendidikan kewarganegaraan berbasis *edupreneur* terdapat beberapa metode yang dikembangkan oleh program studi PPKn, yaitu: 1) mengintegrasikan mata kuliah PKn dengan nilai *edupreneur*; 2) mengintegrasikan jiwa *edupreneur* pada praktik setiap mata kuliah; 3) memilih tema yang menarik yang paling relevan dengan tujuan setiap materi pembahasan; 4) melakukan pembaharuan dalam metode pengajaran, yaitu dengan menjadikan pembelajaran aktif di lapangan (*field study*); dan 5) mengembangkan nilai *edupreneur* melalui kegiatan di luar jam mata kuliah yaitu dengan Laboratorium Demokrasi.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program yang dirancang oleh setiap lembaga pendidikan perguruan tinggi dapat menjamin lulusannya memiliki kualifikasi yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan *entrepreneur* bermakna pengusaha atau wirausahawan. Ada juga yang menyamakan istilah *edupreneur* dengan istilah *teacherpreneur* (Purnomo, 2017). Hasil lain yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi telah mampu memfungsikan dengan baik fungsi pendidikan kewarganegaraan yang menjadikan dirinya sebagai warga negara yang mampu dan siap dalam bersaing dalam lingkungan yang global (Rahmafitria et al., 2021). Hal ini sejalan dengan definisi *edupreneur* oleh Albert (Adnyana, 2016) sebagai suatu proses transmisi kompetensi kewirausahaan yang terstruktur dan formal yang mengacu pada pemberian keterampilan, konsep dan kesadaran mental individu. Lebih mudahnya, *edupreneur* diartikan sebagai seorang wirausahawan yang mengelola dan menjalankan suatu bisnis dalam bidang pendidikan dan siap mengambil apapun resiko dari apa yang dijalankannya.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa fungsi pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada pelaku *edupreneur* (Riggs & Fred, 2011). *Edupreneur* dikenalkan pada mahasiswa perguruan tinggi dengan tujuan membekali diri agar lebih siap untuk terjun dalam dunia kerja, juga untuk meningkatkan *skill* berwirausaha dalam menatap daya saing lulusan perguruan tinggi dalam menempati posisi kerja. Sehingga pelaku *edupreneur* di sini mayoritas adalah mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi. Namun, jika mengacu pengertian dari *edupreneur* sebagai wirausahawan di bidang pendidikan, maka yang dapat menjadi pelaku *edupreneur* tidak hanya lulusan perguruan tinggi saja, melainkan seorang yang bergerak dalam usaha di sektor pendidikan (Puspitaningsih, 2018). Kurikulum pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga dirancang untuk menghasilkan *output* yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk dikenalkan kepada masyarakat umum sebagai bahan untuk mempersiapkan diri sehingga mempermudah proses transformasi pengetahuan berbasis *edupreneur* yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. *Edupreneur* memberikan kecerdasan kepada mahasiswa sebagai agen yang dapat menciptakan peluang (Tri & Suyanto, 2016).

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa perguruan tinggi dipercaya dapat menjadi alternatif untung mengurangi tingkat pengangguran, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang terdidik dengan nilai kewirausahaan yang dimilikinya. Tentu saja hal ini juga dilandasi prinsip dasar pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan warga negaranya untuk berkembang dengan dasar Pancasila dan kekeluargaan (Sarifudin et al., 2020). Temuan peneliti menunjukkan bahwa upaya dalam menjalankan fungsi pendidikan kewarganegaraan merupakan jalan pengingat bahwa *edupreneur* merupakan seseorang yang memiliki profesi sebagai pendidik yang memiliki tugas dalam mengorganisir kegiatan ekonomi yang dibungkus dalam nilai pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan program, mengembangkan dan mengevaluasi program pembelajaran yang berbasis *edupreneur* (Astameon, 2018).

Menurut analisis peneliti bahwa langkah kegiatan ini merupakan upaya program studi PPKn STKIP Pasundan Cimahi dalam membangun partisipasi dan keterlibatan mahasiswa tentang kesadaran berwirausaha mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wibowo yang mengatakan bahwa menumbuhkan kesadaran berwirausaha pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui sentuhan pembentukan pengetahuan pada kegiatan yang membentuk pemahaman mahasiswa tentang *enterpreneur*. Sehingga, pernyataan di atas mengindikasikan bahwa pemahaman dan pengetahuan mahasiswa yang terbentuk melalui program kegiatan formal akan sangat membekas, dengan tujuan pemahaman tersebut dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam lingkungan kehidupan sehari-hari (Wibowo et al., 2019). Pendidikan kewarganegaraan dengan nilai *enterpreneur* merupakan dua bagian yang berjalan beriringan dalam menciptakan warga negara yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dalam kehidupan nyata dengan menjadikan dirinya sebagai warga negara yang maju, mandiri serta mampu bersaing dengan kehidupan di sekitarnya (Astameon, 2018).

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa melalui program pembelajaran pada Laboratorium Demokrasi juga merupakan upaya pendalaman karakter berwirausaha. Laboratorium secara tidak langsung akan membentuk pola kebiasaan dan keteladanan mahasiswa yang berdampak pada pembentukan karakter berwirausaha. Dengan demikian, tidak hanya kesadarannya saja yang terpupuk, tetapi juga pembentukan etika dan karakter dalam berwirausaha.

Temuan lain adalah bahwa melalui program pembelajaran laboratorium demokrasi, pembentukan kesadaran berwirausaha ini juga memberikan manfaat sebagai berikut: 1) manfaat *control*, yaitu peluang kebebasan untuk menyediakan dan mempersiapkan nasib sendiri; 2) *Change*, yaitu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melakukan perubahan; 3) *full potencial*, ialah untuk menggali potensi yang ada pada diri mahasiswa yang belum terekspos sebelumnya; 4) *profit*, yaitu sebuah peluang yang dapat diciptakan oleh mahasiswa untuk memperoleh keuntungan tanpa batas; 5) *Fun In workin*, yaitu peluang melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang

dalam bekerja; dan 6) *Participate*, yaitu peluang yang dapat diraih oleh mahasiswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan memperoleh pengetahuan atas usahanya (Callahan et al., 2014). Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah pelaksana visi pendidikan nasional memuat karakter mandiri dan bertanggung jawab (Winataputra & Budimansyah, 2012).

Hasil penelitian lain dapat digambarkan dengan poin-poin sebagai berikut: 1) pembelajaran PKn di perguruan tinggi dimaksudkan untuk mencetak warga negara yang baik, yang di dalamnya membelajarkan nilai-nilai tentang kesadaran berwirausaha bagi warga negara agar mandiri; 2) pembelajaran yang dilaksanakan melalui materi PKn bersifat terbatas melalui materi hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, demokrasi, konstitusi, dan negara hukum; 3) program pembelajaran PKn sangat mendukung peningkatan kesadaran berwirausaha mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi, ditunjang dengan program-program pendukung seperti adanya laboratorium demokrasi.

Terlaksananya edupreneur melalui pendidikan kewarganegaraan secara tidak langsung juga membentuk *civic entrepreneur* yang dapat meningkatkan sumber daya mahasiswa. Hal ini telah ditegaskan oleh Olalla & Castillo (2020) bahwa mengaudit atau menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yang dilakukan dalam suatu pendidikan merupakan langkah dengan tujuan untuk mendiagnosis, menganalisis, memberikan solusi, serta untuk mengetahui fungsi elemen tertentu. Menganalisis terhadap kebutuhan sumber daya manusia merupakan upaya dasar sebuah institusi pendidikan untuk merancang masa depan pendidikan yang berkualitas. Hal ini melalui penelitiannya dipercaya dapat mengetahui keterbatasan dan minat sumber daya manusia yang berdampak pada jiwa *entrepreneur*.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan minat mahasiswa dalam pembelajaran melalui kegiatan pengabdian. *Civic entrepreneurship* dilakukan dengan rancangan strategi yang sudah melalui proses analisis dan survei terlebih dahulu oleh peneliti. Kegiatan ini dilakukan berbasis *digital* dan *online*. Sesuai dengan urgensi penelitian bahwa hal ini perlu dilakukan agar tetap menumbuhkembangkan jiwa *civic entrepreneurship* pada diri mahasiswa STKIP Pasundan. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa salah satu langkah bentuk pengabdian merupakan usaha peneliti dan program studi untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneur* mahasiswa itu sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dan menanamkan konsep pemahaman awal tentang *civic* dan *entrepreneurship* yang dilengkapi tatacara pelaksanaan seminar serta dokumen yang diperlukan dan yang akan digunakan dalam seminar.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran berwirausaha mahasiswa sejalan dengan visi misi kewirausahaan, yaitu tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga dapat memudahkan cara hal-hal dilakukan dengan menyediakan produk dan layanan yang memiliki nilai bagi pelanggan sambil mengambil semua risiko yang menghalangi. Seseorang memiliki gagasan unik dan praktis dalam benaknya, serta dapat membangun usaha bisnis untuk mengubah ide menjadi produk atau layanan yang dapat membantu banyak orang dengan memudahkan cara kerja dilakukan sebelumnya. Van Draag dan Versloot (2007) mengatakan bahwa kewirausahaan sering dikaitkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, inovasi, pekerjaan dan kreasi usaha. Penelitian empiris juga mendukung hubungan positif antara aktivitas kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, dalam mencapai keberhasilan melaksanakan *edupreneur* melalui PKn, pelaku pendidikan perlu merancang strategi pembelajaran kreatif, yaitu salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Pembelajaran kreatif sangat penting dalam rangka pembentukan generasi kreatif yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. *Edupreneur* adalah pendidikan kewirausahaan yang merupakan usaha untuk mendidik seseorang agar dapat menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang bernilai jual dan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. *Edupreneur* merupakan kegiatan pendidikan yang juga memuat nilai *civic entrepreneur* di dalamnya dilakukan dengan menanamkan mental berwirausaha, maka sejalan dengan pernyataan Rostand

(Kahne et al., 2011) bahwa *edupreneur* merupakan proses dinamika orang untuk menciptakan kekayaan inkremental yaitu kekayaan yang diciptakan oleh individu yang berani dalam mengambil resiko.

Kesimpulan

Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa PKn berperan dalam *edupreneur* mahasiswa. Fungsi PKn dalam wujud *edupreneur* ialah sebagai praktek wirausaha. Upaya dalam memaksimalkan fungsi PKn dalam mengatasi kendala yakni dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam melaksanakan *edupreneur* guna meningkatkan kesadaran berwirausaha masyarakat. Fungsi PKn selain untuk menghasilkan warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, juga secara *skill* menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang mandiri dan memiliki kreativitas tinggi bernilai Pancasila dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip ekonomi dan UU. Laboratorium demokrasi merupakan salah satu sarana yang dijadikan oleh STKIP Pasundan sebagai wadah dalam mengembangkan nilai kewirausahaan. Nilai ini secara proses sudah terintegrasi dengan kurikulum yang di dalamnya termuat kegiatan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kegiatan untuk menumbuhkan nilai dan kesadaran berwirausaha mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Adnyana, I. G. L. A. (2016). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Self Efficacy dan Locus of Controll pada Niat Berwirausaha. *Jurnal Managemen Unud*, 5(2), 311–324.
- Anjani, S. R., Budimansyah, D., & Wahab, A. A. (2014). Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui Pembelajaran PKn untuk Membentuk Warga Negara yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Civicus*, 14(2), 18–33.
- Astameon, M. P. (2018). *Entrepreneurship Dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*. Alfabeta.
- Basrowi. (2011). *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia.
- Callahan, C., Saye, J., & Brush, T. (2014). Social studies teachers' interactions with second generation web-based educative curriculum. *Journal of Social Studies Research*, 3(2).
- Creswell, J. W. (2015). *Riset Perencanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4 ed.). Pustaka Pelajar.
- Desler, G. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Index.
- Fauzan. (2021). *Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Berita Universitas Islam Negeri. <https://fitk.uinjkt.ac.id/kesiapan-perguruan-tinggi-dalam-penerapan-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>
- Gauthier, T. (2020). Teaching Students About the World of Work: A Challenge to Postsecondary Educators: A Book Review. *The Journal of Competency-Based Education*. <https://doi.org/10.1002/cbe2.1225>
- Jamaludin, U., Damanhuri, Setiawan, D., & Raharjo. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat.
- Kahne, J., Ullman, J., & Middaugh, E. (2011). Digital Opportunities for Civic Education. *American Enterprise Institute for Public Policy Research*, 8(1–4).
- Kasmir. (2011). *Kewirausahaan*. Rajawali Press.
- Masitha, A., Zahiroh, N., & Fitriya, R. L. (2017). Edupreneur, berantas pengangguran terdidik. In *Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo*.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, S. (2019). Kurikulum berbasis Entrepreneurship Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Studi kasus program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyahdi STIT Makhdum Ibrahim Tuban). *Jurnal keislaman, hukum dan pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al%20yasini.v4i1.3522>
- Nurmalisa, Y., Mentari, A., & Rohman. (2020). Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Civic Conscience. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, 7, 34–46.
- Nurseto, T. (2010). Pendidikan berbasis entrepreneur. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 8(2), 52–59. <https://doi.org/>: <https://doi.org/10.21831/jpai.v8i2.954>
- Olalla, & Castillo. (2020). Human resources audit. *International Advances in Economic Research. economi research*, 8(1)(58–64). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF02295563>
- Prodi PGMI IPMAFA. (2016). *Pentingnya Edupreneurship bagi Mahasiswa*. Prodi PGMI IPMAFA. <http://pgmi.ipmafa.ac.id/2016/04/pentingnya-edupreneurship-bagi-mahasiswa.html>
- Purnomo, A. (2017). *Pengertian Edupreneur*. OSFHOME. <https://doi.org/http://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3BCR>
- Puspitaningsih, F. (2017). Pengaruh Efikasi Diri dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Motivasi. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 2(2), 223–235.
- Rahmafritia, F., Suryadi, K., & Oktadiana, H. (2021). Applying knowledge, social concern and perceived risk in planned behavior theory for tourism in the Covid-19 pandemic. *Tourism Review*, 76(4), 809–828. <https://doi.org/DOI:10.1108/TR-11-2020-0542>
- Riggs, & Fred. (2011). *Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society*. Houghton Mifflin Company.
- Sarifudin, S., Umran, L. O. M., & Sidu, D. (2020). Pola dan Fungsi Komunikasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera dalam Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Kolaka Timur. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 359–366.
- Tri, H., & Suyanto. (2016). Hubungan EQ, Pengetahuan kewirausahaan, dan hasrat marginal menabung, dengan motivasi berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 3(1), 95–104.
- Wagner. (2016). *Overcoming The Global Achievement Gap (online)*. Cambridge. Harvard University.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Wibowo, Fakhruddin, Rifai, A., & Prihatin, T. (2019). Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4. *Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 2, 910–916.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (Ed.). (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Widya Aksara Press.